

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI DAN UKM
PUBLIKASI HARIAN

Kamis, 24 Juli 2025

Pertama, Kepala Dinas menghadiri upacara penyerahan surat keputusan pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bertindak sebagai pembina upacara sekaligus menyerahkan secara simbolis SK adalah Gubernur NTT Bapak Emanuel Melkiades Laka Lena dihadiri Wakil Gubernur Bapak Jhoni Asadoma, para pimpinan OPD. Tenaga PPPK yang menerima SK Pengangkatan adalah berjumlah 5.480 orang yang tersebar di OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Bertindak sebagai Komandan Upacara adalah KasatPolPP Provinsi NTT Bapak Johan Loban. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Laporan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Bapak Yos Rassi, penyerahan SK. Gubernur menyerahkan secara simbolis SK kepada delapan orang PPPK perwakilan. Dalam sambutan/arahannya gubernur mengatakan bahwa peristiwa ini harus disyukuri dan harus diikuti dengan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan daerah, gubernur juga menyampaikan besaran anggaran APBD untuk penggajian tenaga PPPK tiada lain untuk menggugah kesadaran, tanggungjawab, konsistensi dan komitmen terhadap tugas dan fungsi PPPK dalam kesatuan sistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak lupa beliau menyampaikan selamat kepada para penerima SK tersebut. Acara disertai juga dengan menyanyikan mars KORPRI dan doa serta foto bersama. Kepala Dinas berkesempatan foto bersama PPPK Dinas KopUKM Provinsi NTT.

Kedua, pendalaman UU 6/2014 oleh Kepala Dinas tentang Desa bersama semua ASN Dinas dengan maksud dan tujuan pemahaman kerangka pemerintahan yang melingkupi KDMP/KKMP yaitu Desa. Mengangkat dan mengarahkan semua ASN dinas tentang berbagai point ketentuan umum seperti pengertian desa, pemerintahan desa, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Musyawarah Desa, BUMDes, Peraturan Desa, Pembangunan Desa, Kawasan Pedesaan, Keuangan Desa, Aset Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selanjutnya tentang asas-asas pemerintahan desa yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pemerintah Desa; Perangkat Desa;

Musyawarah Desa; BPD; Penghasilan Pemerintah Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Peraturan Desa; Keuangan dan Aset Desa; Pembangunan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerja Sama Desa; Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Selanjutnya adalah penyampaian oleh Plt Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas KopUKM Provinsi NTT terkait pendalaman dari segi teknis operasional terhadap PMK 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan KDMP/KKMP dengan maksud dan tujuan utama adalah membangun pemahaman bersama semua ASN Dinas tentang beberapa hal teknis operasional agar PMK tersebut dapat diimplementasikan dengan baik khususnya KDMP/KKM di Provinsi NTT antara lain terkait Rencana Bisnis, Penyusunan Proposal, Aset dan Jaminan. Materi ini berguna bagi dinas koperasi dan lembaga terkait untuk dapat menangkap peluang yang diatur dalam PMK 49 tentang peluang pinjaman tersebut.

Ketiga, rapat koordinasi Dinas KopUKM Provinsi NTT dengan dinas yang membidangi urusan koperasi di kabupaten dan kota se-Provinsi NTT khusus terkait PMK 49 Tahun 2025. Dipimpin Kepala Dinas didampingi Plt Kepala Bidang Pemberdayaan, dimoderatori Plt Sekretaris Dinas. Dua pokok maksud dan tujuan Rakor ini demikian kepala dinas adalah saling mengingatkan tentang adanya PMK yang ditandatangani bersamaan dengan peluncuran secara nasional KDMP/KKMP yaitu pada tanggal 21 Juli 2025 beberapa hari yang lalu dan yang kedua adalah media komunikasi seputar point-point PMK tersebut. Beberapa Kepala Dinas Kabupaten mengemukakan pendapat mereka terkait topik ini. Intinya adalah kerja kolaborasi dan perlunya dukungan provinsi terhadap kabupaten dan kota terutama dalam pendampingan dan pelatihan. Pimpinan Rakor, Kepala Dinas Provinsi tidak lupa mengingatkan agar kabupaten dan kota menginformasikan hasil inventarisasi data tentang jumlah anggota KDMP/KKMP, bidang usaha, besaran minimum dan maksimum modal; keberadaan gerai dan jaminan pinjaman. Data ini diperlukan baik untuk kabupaten dan kota sendiri, provinsi maupun pemerintah pusat dan kelembagaan lain terkait. Tidak lupa kepala dinas mengingatkan untuk tetap menjaga semangat bekerja apalagi dengan positif spirit yang kita peroleh dari keberhasilan 100% Provinsi NTT dalam pembentukan KDMP/KKMP di semua desa dan kelurahan di semua kabupaten dan kota di Provinsi NTT yang berjumlah 3.442 KDMP/KKMP demikian Kadis menutup Rakor ini. **AYO BANGUN DESA, INDONESIA JAYA! AYO BANGUN NTT!**

